

**KEBIJAKAN *REFOCUSING* DAN
PENYESUAIAN ANGGARAN
TRANSFER KEUANGAN DAERAH
&
PERCEPATAN PEMBAYARAN
INSENTIF TENAGA KESEHATAN
DAERAH**

Jakarta, 17 Februari 2021



Outline



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

1 Evaluasi TKDD 2020

2 Kebijakan *Refocusing* dan Penyesuaian TKDD TA 2021

3 Percepatan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah



1

Evaluasi TKDD 2020



REALISASI PENYALURAN TKDD MENCAPAI Rp762,5 T

(99,8% DARI PAGU PERPRES 72)



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah mendorong pemanfaatan TKDD oleh Pemda secara maksimal untuk penanganan pandemi Covid-19 dan PEN di daerah

Uraian (triliun rupiah)	2019	2020				
	Realisasi	APBN	Perpres 72/2020	Realisasi	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
1. Transfer ke Daerah	743,2	784,9	692,7	691,4	99,8	(7,0)
a. Dana Perimbangan	711,3	747,2	653,4	652,1	99,8	(8,3)
- Dana Transfer Umum	524,9	544,7	470,8	475,5	101,0	(9,4)
1) DBH	104,0	117,6	86,4	93,9	108,7	(9,7)
2) DAU	420,9	427,1	384,4	381,6	99,3	(9,3)
- Dana Transfer Khusus	186,4	202,5	182,6	176,6	96,7	(5,3)
1) DAK Fisik	64,2	72,2	53,8	50,2	93,3	(21,8)
2) DAK Nonfisik	122,2	130,3	128,8	126,4	98,2	3,4
b. DID	9,7	15,0	18,5	18,5	99,8	90,4
c. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	22,2	22,7	20,9	20,9	100,0	(5,9)
2. Dana Desa	69,8	72,0	71,2	71,1	99,9	1,8
JUMLAH	813,0	856,9	763,9	762,5	99,8	(6,2)

- ✓ Melalui TKDD *refocusing* dan realokasi belanja ditujukan untuk penanganan Covid-19 dan mendukung program PEN.
- ✓ Dukungan TKDD dilaksanakan melalui DID, DAK, Dana Desa, hibah, dan pinjaman kepada daerah.
- ✓ Penyaluran DTK lebih tinggi dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi penyaluran baik DAK Fisik maupun Non Fisik dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19.
- ✓ Realisasi penyaluran Dana Desa menunjukkan peningkatan didukung oleh penyederhanaan proses penyaluran Dana Desa.



CAPAIAN MANFAAT TKDD 2020 (1)

Realisasi output TKDD Tahun 2020 diikuti dengan hasil nyata yang produktif



BANSOS, BANTUAN PEMERINTAH, SUBSIDI, DUKUNGAN UMKM



BLT Desa
8 juta penerima



Kegiatan padat karya diikuti
920,7 rb orang (66,4%)



Bantuan budidaya ternak
sebanyak 7.810 unit/set, 7.494 ternak, 63.510 bibit/benih (29,17% target)



Bantuan peralatan sebanyak
131 unit (29,17% target)



Fasilitas promosi sebanyak 5 frekuensi,
520 orang (29,17% target)



Bantuan usaha untuk 520
UMKM (29,17% target)

KESEHATAN



Insentif Nakes
(Akumulasi pembayaran)
▪ Daerah : 776,2 ribu org



**Penambahan Gedung/
Ruang Baru Puskesmas**
Target 283 Paket, Realisasi
260 Paket (91%)



Pembangunan/ Rehab RS
Target 533 Paket, Realisasi
469 paket di 269 RS (88%)



Pengadaan Alat kesehatan →
Target 17.769 Paket, Realisasi
13.602 paket (77%)



Obat-obatan atau barang
habis pakai → Target 3.722
Paket, Realisasi 1. 222 paket
(87%)

Pelatihan

- Nakes 2.852 orang,
- Tenaga Administrasi 6.765 org (44,13% target)



Pembayaran luran JKN →
664.595 orang



Pembayaran tindakan
kesehatan fakir miskin →
2.935 orang



Bantuan Operasional untuk
9.298 Puskesmas



Pelayanan Kesehatan
- promotif/preventif
3.320 orang
- kuratif rehabilitatif
→ 530,2 rb org



CAPAIAN MANFAAT TKDD 2020 (2)

Realisasi output TKDD Tahun 2020 diikuti dengan hasil nyata yang produktif



INFRASTRUKTUR

Jaringan Irigasi

- Pembangunan Target 241 ha, Realisasi 241 ha (100% target)
- Peningkatan Target 222 ha, Realisasi 222 ha (100% target)
- Rehabilitasi Target 135.209 ha, Realisasi 133.279 ha (99% target)



Sistem Penyediaan Air Minum

- Pembangunan Baru Target 7.791 SR, Realisasi 7.791 SR (100% target)
- Peningkatan Target 22.871 SR, Realisasi 22.750 SR (99% target)
- Perluasan Target 243.783 SR, Realisasi 223.638 SR (92% target)

Jalan

- Pembangunan Target 37 km, Realisasi 37 km (100% target)
- Pemeliharaan Target 1.048 km, Realisasi 1.021 km (97% target)
- Peningkatan Target 938 km, Realisasi 938 km (100% target)

Jembatan

- Pembangunan Target 150 m, Realisasi 150 m (100% target)
- Pemeliharaan Target 429 m, Realisasi 427 m (99% Target)

Sanitasi

- Pembangunan Tangki Septik Target 156.624 Unit, Realisasi 150.959 Unit (96% target)
- Pembangunan MCK++ Target 165 Unit, Realisasi 165 Unit (100% target)
- Pembangunan IPAL Target 595 Unit, Realisasi 595 Unit (100% target)



Pertanian

- Pembangunan Sumber-Sumber Air Target 3.746 Unit, Realisasi 3.651 Unit (97% target)
- Pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Baru Target 15 Unit, Realisasi 15 Unit (100% target)
- Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian Target 5.239 m2, Realisasi 5.239 m2 (100% target)
- Sarana Pendukung BPP Target 213 Paket, Realisasi 213 Paket (100% target)
- Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Target 52 Unit, Realisasi 52 Unit (100% target)

PENDIDIKAN



BOS 44,2 juta siswa pada 216 ribu sekolah



Rehabilitasi Target 30.689 Ruang, Realisasi 30.138 Ruang Kelas (98%)



BOS PAUD bagi 6,1 juta anak



Pembangunan RKB beserta perabot Target 6.473, Realisasi 6.404 Ruang (99%)



Tunjangan Profesi Guru 1,15 juta guru



Pengadaan Peralatan Pendidikan Target 45.874 Paket, 45.874 Paket (100%)



Pelatihan Kepariwisata 16.550 peserta pelatihan dan 38 TIC



Pembangunan Laboratorium Target 3.456 Ruang, Realisasi 3.456 Ruang (100%)



2 Kebijakan *Refocusing* dan Penyesuaian TKDD TA 2021



ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

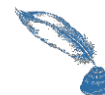
Peningkatan *quality control* anggaran TKDD dan mendorong Pemda dalam pemulihan ekonomi, pendidikan & kesehatan



ARAH KEBIJAKAN TKDD

- 1 Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional, melalui:
 - a. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi.
 - b. Dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan UMKM.
- 2 Mensinergikan TKDD dan Belanja K/L dalam pembangunan human capital (Pendidikan dan Kesehatan).
- 3 Mendorong belanja Infrastruktur daerah melalui creative financing untuk mendukung pencapaian target RPJMN.
- 4 Redesain pengelolaan TKDD, terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.
- 5 Meningkatkan kinerja TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi Standar Harga Satuan Regional dan Bagan Akun Standar.

URAIAN	2020 Perpres 72	2021	Growth
TRANSFER KE DAERAH	692.7	723.5	4,4%
I. Dana Perimbangan	653.4	688.7	5,4%
A. Dana Transfer Umum	470.8	492.3	4,6%
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	86.4	102.0	18,1%
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	384.4	390.3	1,5%
B. Dana Transfer Khusus	182.6	196.4	7,6%
1. Dana Alokasi Khusus Fisik	53.8	65.2	21,2%
2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128.8	131.2	1,5%
II Dana Insentif Daerah	18.5	13.5	-27,0%
III Dana Otsus dan DaIs DIY	20.9	21.3	1,9%
DANA DESA	71.2	72.0	1,1%
JUMLAH	763.9	795.5	4,1%



Catatan : Dukungan Pemerintah kepada daerah selain melalui TKDD juga dilakukan melalui hibah daerah dan pinjaman daerah



TKDD 2021

Refocusing TKDD TA 2021 untuk Penanganan Pandemi COVID-19



DANA DESA

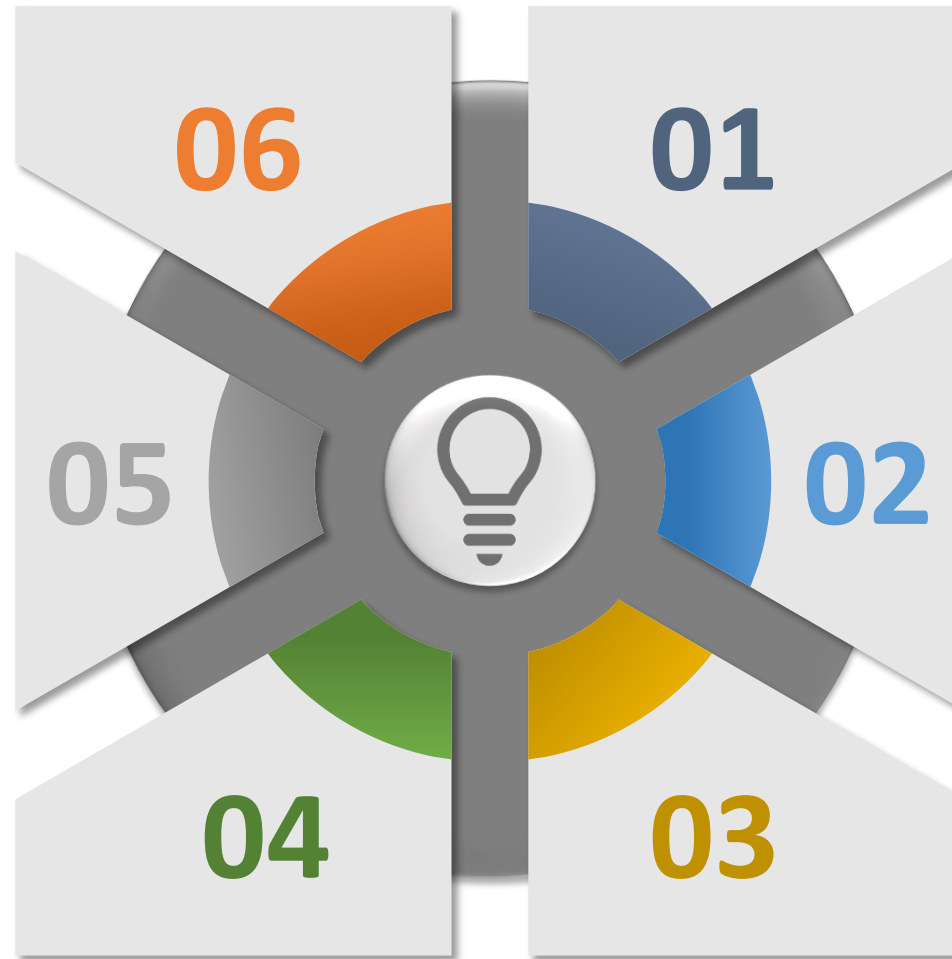
Mendukung Pemulihan Perekonomian Desa melalui pelaksanaan BLT Desa sebesar Rp300.000,00/KPM/bulan dan *earmarked* 8% untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 antara lain untuk aksi desa aman Covid-19.

DID

Penggunaan DID paling sedikit 30% untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasaran kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan dan untuk perlindungan sosial.

DAK NON FISIK

Penanganan Covid-19 melalui penyesuaian penggunaan DAK Non Fisik Kesehatan.



DBH

Mengoptimalkan pemanfaatan DBH dalam rangka mendukung penanganan kesehatan, Innakes daerah, jaring pengaman sosial serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19.

DAU

Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8% yang digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Innakes daerah, mendukung kelurahan dalam kegiatan pos komando tingkat kelurahan.

DAK FISIK

Mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya DAK Fisik.

SURAT EDARAN NOMOR SE-2/PK/2021



Refocusing DAU dan DBH



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Dukungan Pendanaan pemda dalam bentuk Realokasi dan *refocusing* DAU dan/atau DBH, antara lain:

- a. Untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, berupa:
 - dukungan operasional;
 - pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
 - distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19; dan
 - Insentif tenaga kesehatan daerah.
- b. Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan Pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan digunakan antara lain untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan.
- c. Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.
- d. Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.

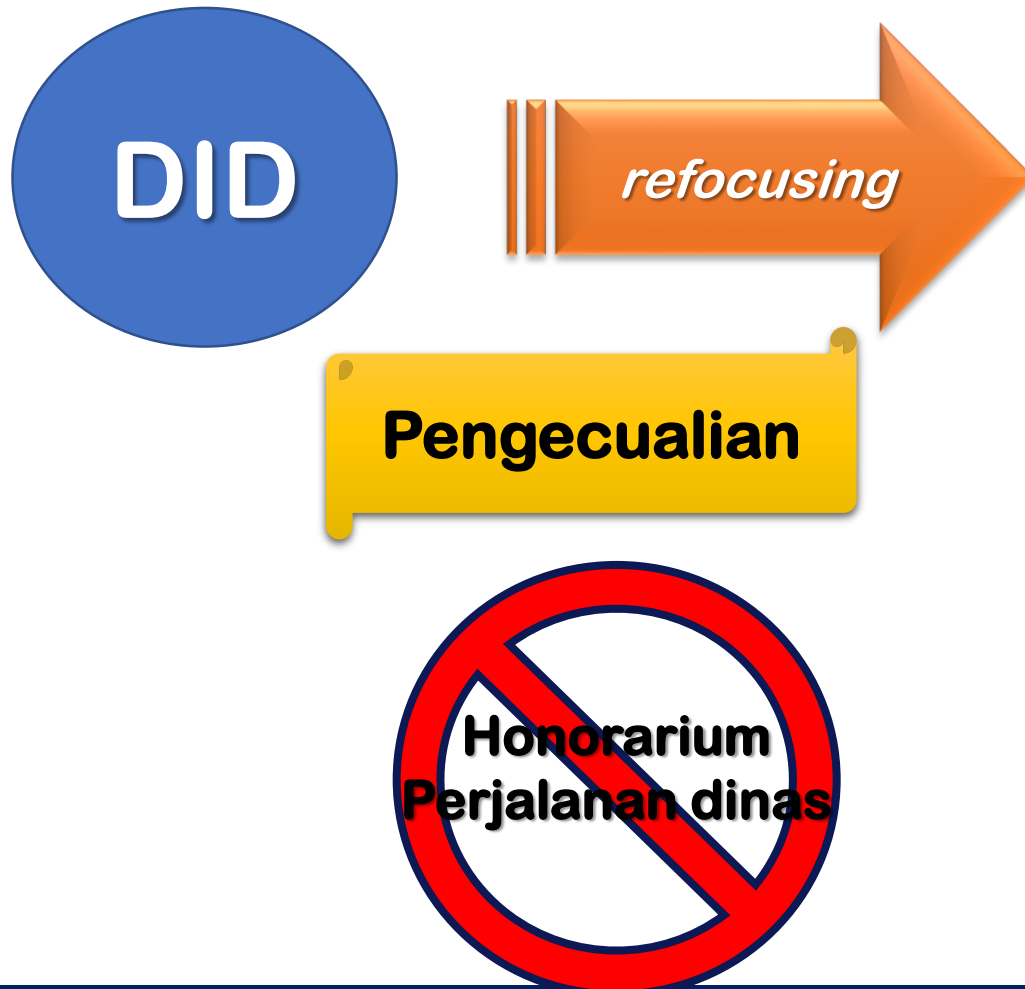
* Penghitungan besaran dukungan pendanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus COVID-19 di Daerah masing-masing



Refocusing DID



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Penggunaan:

- bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan;
- bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sarana prasarana kesehatan, dan digitalisasi pelayanan kesehatan;
- penguatan perekonomian Daerah termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau
- perlindungan sosial.

Paling sedikit 30% dari alokasi DID TA
2021 untuk bidang kesehatan



Refocusing Dana Desa



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- Dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di desa, Dana Desa ditentukan penggunaannya (earmarked) antara lain untuk Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan kewenangan Desa.
- Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di seluruh Desa, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai Desa.
- Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilakukan melalui pos komando di tingkat Desa atau pos jaga di Desa yang memiliki fungsi
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa.
- Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 termasuk pelaksanaan PPKM Mikro di desa, rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh desa mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



REFOCUSING PELAKSANAAN DAK FISIK SECARA PADAT KARYA



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LATAR BELAKANG

- ❑ Dampak Pandemi COVID-19 masih sangat dirasakan oleh perekonomian masyarakat, ditandai dengan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
- ❑ APBN masih menjadi alat kunci pemulihan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- ❑ DAK Fisik agar dapat dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah



PENYESUAIAN PELAKSANAAN DAK FISIK

- DAK Fisik TA 2021 mengutamakan penyerapan sebanyak mungkin tenaga kerja lokal dan/atau penggunaan bahan baku lokal, dengan berpedoman pada petunjuk teknis/petunjuk operasional DAK Fisik.
- Penyerapan tenaga kerja dilaporkan dalam aplikasi OMSPAN dan menjadi syarat penyaluran DAK Fisik tahap berikutnya.

(SE Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor SE-2/PK/2021)



3

Percepatan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah



INSENTIF NAKES MELALUI BOK TAMBAHAN



TUJUAN : memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berjuang untuk menangani COVID-19

MASA PEMBERIAN : Maret s.d Desember 2020 dan dapat diperpanjang jika ada kebijakan baru terkait penanganan Pandemi Covid-19.

ALOKASI : Rp 3.700,0 miliar dan terdapat penambahan alokasi sebesar **Rp473,33 miliar**

REALISASI :

1. Realisasi penyaluran ke Kasda Rp4.173,32 miliar (99,9%).
2. Dari Rp4.173,32 miliar yang telah salur ke Kasda, → telah dibayarkan kepada tenaga kesehatan daerah seluruh provinsi/kabupaten/kota sebanyak 776.249 orang dengan total pembayaran **sebesar Rp3.045,41 miliar* (73%)**.

*Data per 10 Februari 2021

MONITORING DAN EVALUASI:

1. Melalui aplikasi **Insentive Covid**, Kemenkes melakukan monitoring dan memandu daerah dalam menetapkan jumlah Nakes (yang dapat diberikan insentif nakes) agar sesuai Kepmenkes No. 2539/2020;
2. Melalui aplikasi **Aladin** (Pelaporan DAK Nonfisik), Kemenkeu melakukan *desk monitoring* pelaporan oleh Daerah berdasarkan kesesuaian pembayaran SP2D dengan rekapitulasi-nya;
3. Pendampingan di Daerah oleh BPKP sebagai kontrol dan akuntabilitasnya.

KENDALA PELAKSANAAN:

1. Lambannya proses perubahan Perkada Penjabaran APBD dan revisi DPA guna menampung anggaran insentif Nakes melalui BOK Tambahan;
2. Tidak maksimalnya koordinasi teknis di tingkat Satker khususnya antara faskes di daerah (RSUD, puskesmas, labkesda) dengan Dinas Kesehatan;
3. Penganggaran dan penyaluran yang mepet di akhir tahun membuat OPD kesulitan untuk merealisasikannya.



UPAYA PENYELESAIAN INNAKES 2020 (1)

ALOKASI TA 2020 : Rp 4.173,33 M



Realisasi penyaluran ke Kasda Rp4.173,32 M



Realisasi pembayaran kepada nakes Rp3.045,41 M



Perkiraan Sisa Dana di Kasda Rp1.127,90 M

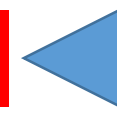
Langkah-Langkah yang sudah dilakukan:



- ➔ DJPK melalui surat nomor S-20/PK/2021 tanggal 4 Februari 2021 menyampaikan bahwa sisa dana BOKT TA 2020 agar segera dianggarkan kembali pada APBD 2021 dan digunakan untuk pembayaran innakes atas kinerja 2020 dan melaporkannya paling lambat tanggal 28 Februari 2021.
- ➔ Kemendagri melalui surat Nomor 910/870/Keuda tanggal 4 Februari 2021 menyampaikan Langkah-Langkah untuk penganggaran sisa dana BOKT 2020 pada APBD 2021 dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020.
- ➔ Kementerian Kesehatan melalui surat Nomor KU.04.01/3/0150/2021 tanggal 2 Februari meminta daerah untuk menyampaikan laporan realisasi dan kebutuhan innakes 2020 yang belum terbayarkan pada TA 2020 yang sudah diverifikasi oleh APIP daerah paling lambat 15 Februari 2021.



Daerah masih belum merespon secara cepat





UPAYA PENYELESAIAN INNAKES 2020 (2)

Sumber BOK Tambahan 2020

Kinerja	Pembayaran	Action
2020	2020	YES ✓
2020	2021	YES ¹⁾ ✓
2021	2021	YES ²⁾ ✓

- 1) *carry over* 2020 yang belum dibayar dan bersumber dari sisa dana di Kasda yang dianggarkan kembali pada APBD 2021
- 2) Sisa dana BOKT 2020 yang masih ada setelah kinerja 2020 telah dibayarkan semua, dapat digunakan untuk membayarkan kinerja Innakes 2021.

Sumber Earmarked DAU/DBH 2021

Kinerja	Pembayaran	Action
2020	2020	NO ✗
2020	2021	YES ³⁾ ✓
2021	2021	YES ✓

- 3) *carry over* 2020 yang belum dibayar, namun tidak memiliki sisa dana di Kasda yang bersumber dari BOKT dibayarkan melalui earmarked DAU/DBH 2021

1. Kinerja 2020 yang belum dibayarkan pada tahun 2020 dapat dibayarkan menggunakan sisa dana BOKT;
2. Dalam hal sisa dana BOKT tidak mencukupi, kinerja 2020 yang belum dibayarkan pada tahun 2020 dapat dibayarkan menggunakan *earmarking* dana DAU dan/atau DBH;
3. Pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah atas kinerja Tahun Anggaran 2021 bersumber dari *earmarking* dana DAU dan/atau DBH dan sisa dana BOKT (apabila masih ada).



TERIMA KASIH